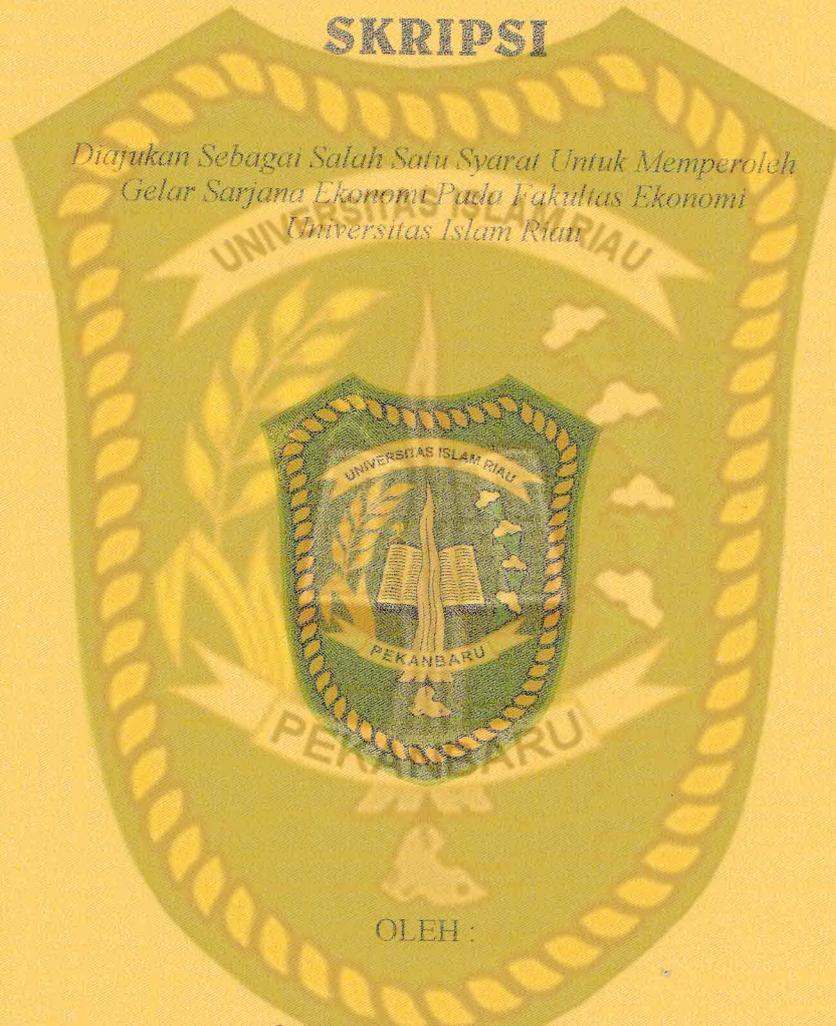


**ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR)
DAN INVESTASI TERHADAP PENYERANGAN TENAGA KERJA
DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau*



OLEH :

SARAH ELPRIDA

NPM : 165110665

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020



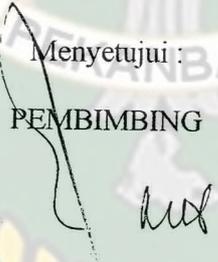
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Alamat: JL. Kaharuddin Nasution No 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

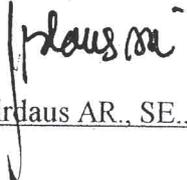
NAMA : SARAH ELPRIDA
NPM : 165110665
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI
JUDUL : ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH MINIMUM
REGIONAL (UMR) DAN INVESTASI TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI
RIAU

Menyetujui :
PEMBIMBING


Drs. M. NUR., MM

Mengetahui :

DEKAN


Drs. Firdaus AR., SE., M.si., AK

KETUA JURUSAN


Drs. M. Nur., MM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SARAH ELPRIDA
TEMPAT/TGL LAHIR : PEKANBARU, 13 NOVEMBER 1998
NPM : 165110665
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil karya orang lain (**bukan plagiat/duplikasi**) dan sistematika penulisannya sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut atau dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2020



SARAH ELPRIDA

ABSTRAK

PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI RIAU

Oleh:

Sara Elfrida

165110665

(Dosen Pembimbing: Drs.M.Nur.,MM)

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau yang bertujuan agar dapat mengetahui adanya pengaruh variabel bebas upah minimum regional dan investasi terhadap variabel terikat penyerapan tenaga kerja di provinsi riau. Di penelitian ini penulis melakukan analisis kuantitatif dan regresi berganda, jenis yang digunakan adalah data time series dan data olahan yang digunakan yaitu dengan menggunakan program eviews 9.0. Yang dimana sumber data utama yang digunakan ialah data upah minimum regional (UMR), investasi dan penyerapan tenaga kerja tahun 2008-2019 di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa R^2 bernilai 0.977387. Yang dimana dapat kita lihat variabel bebasnya bernilai 97,74% (Upah Minimum Regional Dan Investasi) yang dimana sudah mewakili untuk menjelaskan variabel bebas mempunyai hubungan dengan variabel terikat Penyerapan Tenaga Kerja. Dan selebihnya sebesar 2,26% yang terdapat di variabel lain. Yang dimana dapat kita lihat variabel bebas dan uji T(Parsial) dimana variabel Upah Minimum Regional (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (y) di Provinsi Riau, kemudian variabel investasi (X_2) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyerapan tenaga kerja (y) di Provinsi Riau. Sedangkan berdasarkan uji F (Simultan) kedua variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional, dan Investasi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL MINIMUM WAGE AND INVESTMENT LEVELS ON EMPLOYMENT IN RIAU PROVINCE

BY:

SARA ELFRIDA

165110665

(Consultant: Drs.M.Nur,MM)

The research was conducted in Riau Province which aims to find out the influence of the regional minimum wage free variable and investment on the dependent variable of labor absorption in Riau Province. In this study the authors conducted a quantitative analysis and multiple regression, the type used was time series data and processed data used, namely by using the program eviews 9.0. Where the main data sources used are regional minimum wage data (UMR) investment and employmen in 2008-2018 in Riau Province. The results showed that R^2 is 0,977387. Which we can see that the independent variable is 97,74% (Regional Minimum Wage and Investment) which has been represented to explain the independent variable has a relationship with the dependent variable labor absorption. And the rest of 2,26% is found in other variables. Which where we can see the independent variables and the T test(Partial) where the Regional Minimum Wage Variable (X1) has a positive and significant effect on employment (y) in Riau Province, then the investment variable (X2) has a negative and significant effect on Absorption workforce (y) in Riau Province. Wheres as based the Regional Minimum wage variable (X1) has a positive and significant effect on employment (Y) in Riau Province, then the investment variable (X2) has a negative and significant effect on absorption workfkorce (y) in Riau Province. Where as based on the F test (Simultaneous) both independent variables simultaneously have a significant effect on Labor Absorption.

Keywords: Labor Absorption, Regional Minimum Wages, and Investment.

ABSTRAK	
ABSTRACK	
KATA PENGANTAR.....	i
·	
DAFTAR ISI.....	iv
·	
DAFTAR TABEL.....	vii
·	
DAFTAR GAMBAR.....	viii
·	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	6
1.5.Sistemika Penulisan.....	7
BAB II PENDAHULUAN.....	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	8
2.1.1.Konsep Tenaga Kerja.....	8
2.1.2.Konsep Penyerapan Tenaga Kerja.....	9
2.1.3.Konsep Permintaan Tenaga Kerja.....	12
2.1.4.Konsep Upah Minimum.....	15
2.1.5.Konsep Investasi.....	18
2.1.6.Isu keterkaitan variabel UMR,INVESTASI terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	19
a. Pengaruh UMR terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	19
b. Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan	20

Tenaga Kerja.....	
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Hipotesis.....	23
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	
3.1. Lokasi Penelitian.....	24
3.2. Populasi dan Sampel.....	24
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5. Definisi Variabel Penelitian.....	25
3.6. Metode Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1 Keadaan Geografis Provinsi Riau.....	31
4.1.1 Keadaan Alam.....	32
4.1.2 Iklim dan Curah Hujan Provinsi Riau	33
4.2 Pemerintahan Provinsi Riau	34
4.3 Penduduk Provinsi Riau.....	37
4.4 Tenaga Kerja.....	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Perkembangan Variabel Penelitian.....	42
5.1.1 Perkembangan UMR di Provinsi Riau	42
5.1.2 Perkembangan Investasi.....	43
5.2 Analisis Statistik Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja...	44

5.2.1 Analisis koefisien determinasi (R^2).....	46
5.2.2 Uji F.....	47
5.2.3 Uji T(Parsial).....	47
5.2.4 Uji Asumsi Klasik.....	48
5.3 Analisis Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Riau.....	53
5.4 Pembahasan.....	54
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	55
6.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
ABSTRACK	
KATA PENGANTAR.....	i
·	
DAFTAR ISI.....	iv
·	
DAFTAR TABEL.....	vii
·	
DAFTAR GAMBAR.....	viii
·	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	6
1.5.Sistemika Penulisan.....	7
BAB II PENDAHULUAN.....	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	8
2.1.1.Konsep Tenaga Kerja.....	8
2.1.2.Konsep Penyerapan Tenaga Kerja.....	9
2.1.3.Konsep Permintaan Tenaga Kerja.....	12
2.1.4.Konsep Upah Minimum.....	15
2.1.5.Konsep Investasi.....	18
2.1.6.Isu keterkaitan variabel UMR,INVESTASI terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	19
a. Pengaruh UMR terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	19

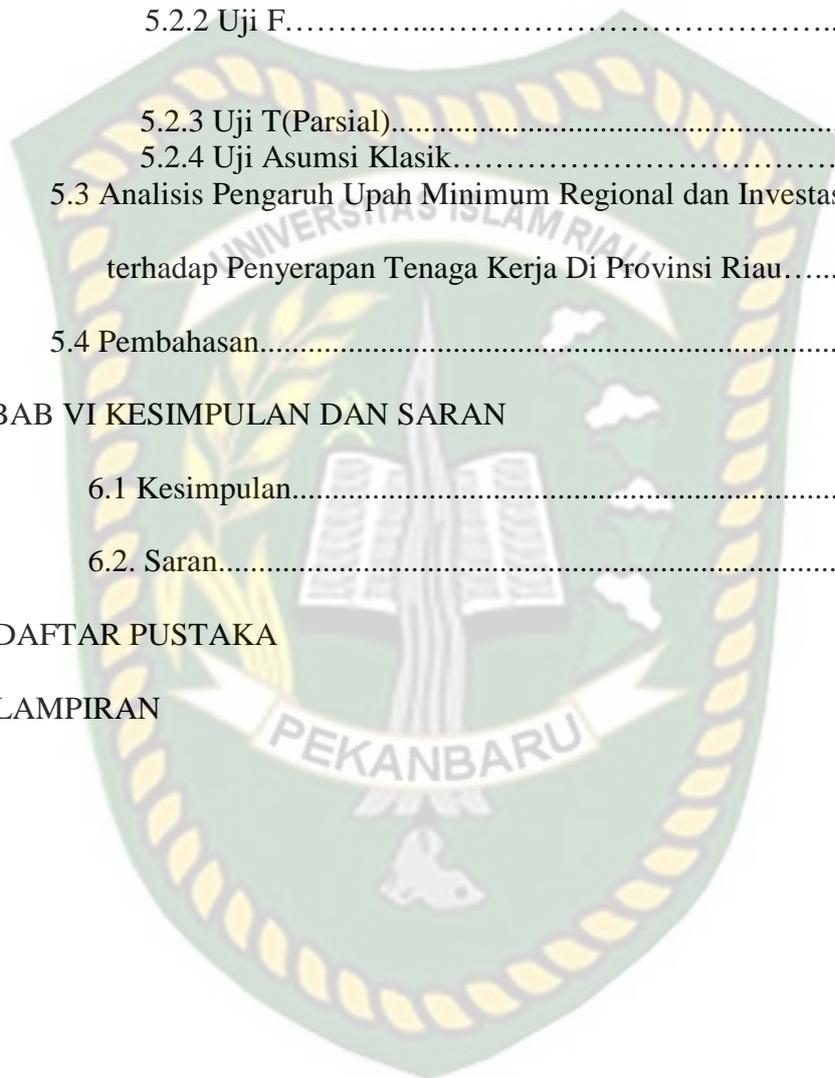
b. Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Hipotesis.....	23
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	
3.1. Lokasi Penelitian.....	24
3.2. Populasi dan Sampel.....	24
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5. Definisi Variabel Penelitian.....	25
3.6. Metode Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1 Keadaan Geografis Provinsi Riau.....	31
4.1.1 Keadaan Alam.....	32
4.1.2 Iklim dan Curah Hujan Provinsi Riau	33
4.2 Pemerintahan Provinsi Riau	34
4.3 Penduduk Provinsi Riau.....	37
4.4 Tenaga Kerja.....	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Perkembangan Variabel Penelitian.....	42
5.1.1 Perkembangan UMR di Provinsi Riau	42
5.1.2 Perkembangan Investasi.....	43
5.2 Analisis Statistik Pengaruh Upah Minimum Regional	44

Dan Investasti Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja...

5.2.1 Analisis koefesien determinasi (R^2).....	46
5.2.2 Uji F.....	47
5.2.3 Uji T(Parsial).....	47
5.2.4 Uji Asumsi Klasik.....	48
5.3 Analisis Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Riau.....	53
5.4 Pembahasan.....	54
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	55
6.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

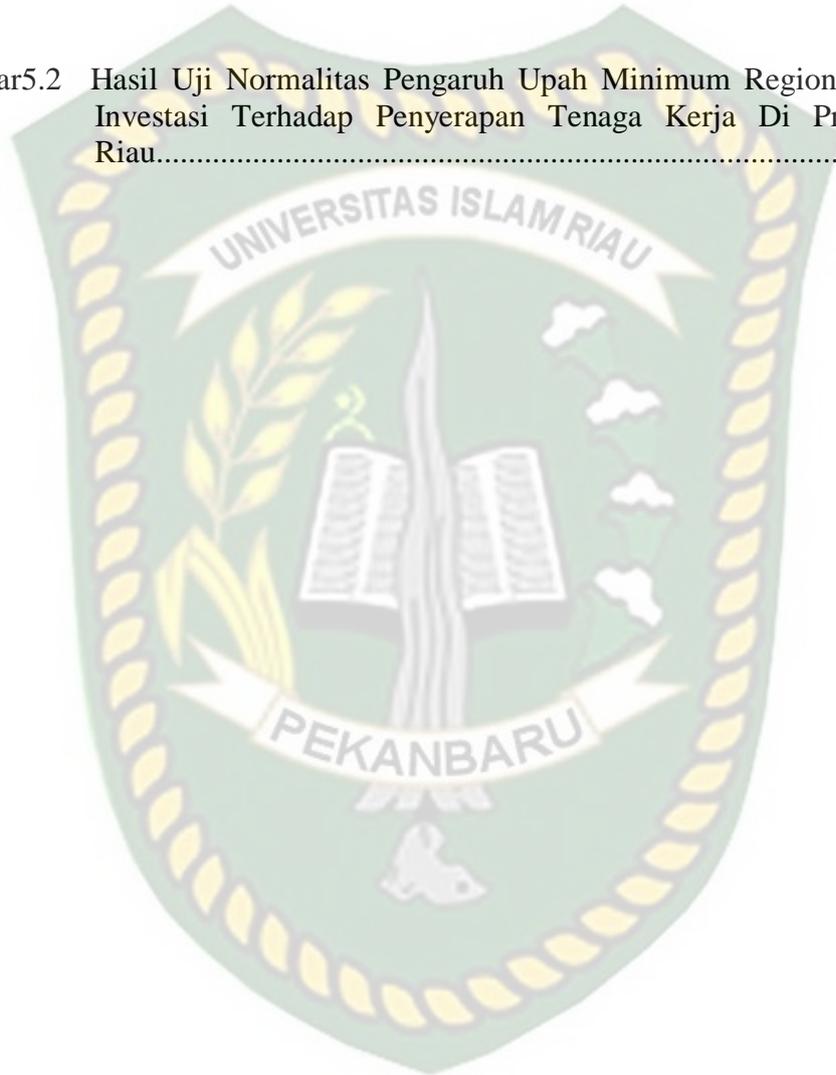


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Angkatan Kerja (AK) Provinsi Riau 2009-2018.....	3
1.2 Upah Minimum Riau (UMR) di Provinsi Riau tahun 2009-2018.....	4
13 Investasi di Provinsi Riau dari tahun 2009-2018.....	5
2.2 Penelitian terdahulu.....	21
4.1 Nama Ibukota dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau.....	36
4.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan /Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2018.....	40
4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018.....	41
4.4 Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Riau Pada tahun 2018.....	43
4.5 Jumlah Tenaga Kerja Di Provinsi Riau Pada Tahun 2018.....	43
5.1 (UMR) di Provinsi Riau dari tahun 2009-2018 (Juta Rupiah).....	45
5.2 Investasi di Provinsi Riau Pada Tahun 2009-2018 (Milyar Rupiah).....	47
5.3 Hasil Estimasi Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	48
5.4 Hasil Uji Multikolinieritas Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau pada Tahun 2009-2018.....	52
5.5 Hasil Uji Heterokedasitas Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau Pada Tahun 2009-2018	55

DAFTAR GAMBAR

- Gambar5.1 Hasil Uji Autokorelasi Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau..... 54
- Gambar5.2 Hasil Uji Normalitas Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Riau..... 55



Lampiran 1.1: Upah Minimum Regional di Provinsi Riau dari tahun 2009-2018 (juta rupiah).

NO	Tahun	Upah Minimum Regional (UMR)
1	2009	901.600
2	2010	1.016.000
3	2011	1.120.000
4	2012	1.238.000
5	2013	1.400.000
6	2014	1.700.000
7	2015	1.878.000
8	2016	2.095.000
9	2017	2.266.722
10	2018	2.463.928

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Lampiran 1.2: Investasi di Provinsi Riau pada tahun 2009-2018 (Milyar Rupiah)

No.	Tahun	PMDN	PMA	Investasi
1	2009	3.386.000.000	2.968.880.000	6.354.880.000
2	2010	1.037.130.000	805.690.000	1.842.820.000
3	2011	7.462.600.000	1.974.750.000	9.437.350.000
4	2012	5.450.430.000	10.721.550.000	16.171.980.000
5	2013	4.874.270.000	12.309.730.000	17.184.000.000
6	2014	7.707.550.000	14.674.750.000	22.382.300.000
7	2015	9.943.040.000	8.167.420.000	18.110.420.000
8	2016	6.613.700.000	11.901.790.000	18.515.420.000
9	2017	1.082.980.000	14.189.000.000	25.018.530.000
10	2018	9.056.400.000	13.840.590.000	22.896.990.000

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi diajukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, menjaga kestabilan harga, keseimbangan neraca pembayaran, serta peningkatan kesempatan kerja. Bukan hanya pembangunan ekonomi saja akan tetapi tenaga kerja termasuk dari salah satu faktor pendukung dari perekonomian suatu negara, yang bertujuan untuk memajukan perekonomian sehingga diperlukan tenaga kerja yang berkualitas.

Pembangunan yang dilakukan tidak hanya ditingkat pusat tetapi pembangunan seharusnya dapat dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Pembangunan yang dilakukan di wilayah yang lebih kecil akan memberikan hasil yang mampu mendukung pembangunan yang dilakukan di wilayah yang lebih besar.

Indonesia yang merupakan negara berkembang merupakan satu dari banyak negara yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja seperti mengenai tingginya jumlah pengangguran, dimana diketahui pengangguran merupakan masalah yang menghambat proses pembangunan suatu negara. Namun seiring majunya tingkat peradaban, makin banyak dan semakin bervariasi pula kebutuhan manusia yang diakibatkan karena ketidakseimbangannya antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan laju pemenuhan kebutuhan yang terbatas yang menyebabkan terjadinya pengangguran (Deliarnov, 2005). Pengangguran yang jumlahnya

bertambah terus menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting karena sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi serta berperan baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan ketenagakerjaan yang masih menjadi hambatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Riau diantaranya rendahnya kualitas tenaga kerja dan tingkat upah pekerja.

Provinsi Riau terdiri dari dua belas kabupaten atau kota yang memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik ekonomi, sosial dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda-beda antar daerah. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan menyebar keseluruh kabupaten atau kota di Provinsi Riau.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, karena pemerataan pembangunan dapat terwujud. Upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia yang berkualitas adalah solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif yang termasuk didalamnya angkatan kerja yang berkerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja.

Tabel 1.1: Jumlah Tenaga Kerja Di Provinsi Riau Pada Tahun 2009-2018 (Jiwa)

No.	Tahun	Tenaga Kerja
1	2009	2.260.862
2	2010	2.377.494
3	2011	2.461.112
4	2012	2.509.501
5	2013	2.623.310
6	2014	2.695.247
7	2015	2.771.349
8	2016	2.987.952
9	2017	2.965.585
10	2018	3.108.398

Sumber: BPS Provinsi Riau, Tenaga kerja Provinsi Riau 2019.

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah angkatan kerja yang digolongkan berkerja mulai dari tahun 2009-2018 mengalami peningkatan, sedangkan jumlah angkatan kerja yang digolongkan dalam pengangguran mulai dari tahun 2009-2018 cenderung mengalami fluktuasi angka tertinggi dapat kita lihat pada tahun 2016 yang jumlahnya 222.006 (Jiwa), dan angka terendah pada tahun 2013 yang menduduki angka 143.817(Jiwa). Angkatan kerja berhubungan dengan jumlahnya penduduk,karena ukuran besarnya angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan meningkatkan pula angkatan kerja.

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang selalu menjadi tujuan bagi para pendatang untuk mencari penghasilan yang lebih memuaskan karena upah yang lebih baik dan kehidupan kota yang dinilai menyenangkan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru membuat banyak orang tergiur untuk mengadu nasib dan berharap memperbaiki keadaan ekonomi. Semakin tinggi upah yang dimiliki seseorang maka semakin sejahteranya perekonomiannya. Karena

mereka memiliki upah yang lebih baik. Adapun tingkat Upah Minimum Regional yang telah ditetapkan dari provinsi Riau yang dapat kita lihat sebagai berikut.

Tabel 1.2: Upah Minimum Regional di Provinsi Riau dari tahun 2009-2018 (rupiah).

NO	Tahun	Upah Minimum Regional (UMR)
1	2009	901.600
2	2010	1.016.000
3	2011	1.120.000
4	2012	1.238.000
5	2013	1.400.000
6	2014	1.700.000
7	2015	1.878.000
8	2016	2.095.000
9	2017	2.266.722
10	2018	2.463.928

Sumber: Badan Pusat statistik, Provinsi Riau. *Upah Minimum Regional 2019.*

Berdasarkan dari tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa tingkat *Upah Minimum Regional* di provinsi Riau dari tahun 2009-2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang seperti dapat kita lihat bahwa pada tahun 2009 tingkat *UMR* berjumlah Rp. 901.600 dan pada tahun 2018 berjumlah Rp. 2.463.928.

Belajar dari pembangunan negara maju, muncul keyakinan banyak negara berkembang berfikir bahwa industri dipandang sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengejar ketinggalan dari negara maju. Selain industri dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional, disisi lain industri dapat mengikis keterbelakangan, kemiskinan, dan mempercepat proses modernisasi. Sehingga tidak heran bahwa globalisasi akan memberikan dua

dampak kepada setiap negara termasuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), baik itu dari sisi positif dan negatif. Dalam pelaksanaannya, industri manufaktur membutuhkan modal yang banyak salah satu sumber modal industri baik investasi baik pemerintah (PMDN) maupun swasta (PMA). Adapun data investasi yang ditetapkan oleh Provinsi Riau yang dapat kita lihat sebagai berikut.

Tabel 1.3: Investasi di Provinsi Riau dari tahun 2009-2018 (juta rupiah)

NO	Tahun	Investasi
1	2009	6.354,88
2	2010	1.842,82
3	2011	9.437,35
4	2012	16.171,98
5	2013	17.184,00
6	2014	22.382,30
7	2015	18.110,42
8	2016	18.515,42
9	2017	25.018,53
10	2018	22.896,99

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

. Pengeluaran perusahaan secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal baik untuk mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas usaha yang telah ada dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan untuk mengeluarkan Investasi.

Pada latar belakang diatas, peneliti terinspirasi mengangkat judul “ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI RIAU”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

Bagaimana pengaruh tingkat upah minimum regional dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah “Mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Dan Investasti Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Riau”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan bantuan pemikiran dan masukan untuk pemerintah dan instansi yang terkait dalam membuat kebijakan dan penentuan Upah Minimum Regional dan Investasi di Provinsi Riau. Sebagai wahana bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai konsep-konsep teori yang diperoleh terhadap pembahasan permasalahan yang ada.
2. Menjadi bahan refrensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam masalah yang sama dimasa yang akan datang.
3. Wacana untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dibagi menjadi enam bab, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang merupakan teori pendukung dalam penulisan skripsi ini dan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan secara umum lokasi penelitian, penjelasan ini berkaitan dengan tema penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi ringkasan dari hasil pembahasan, dan saran yang diberikan untuk mengatasi permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Tenaga Kerja

Menurut Mulyadi (2003) tenaga kerja atau *man power* adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi suatu barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Angkatan kerja adalah bagian yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan adalah termasuk dalam sebutan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat dalam kegiatan produktif yaitu yang memproduksi barang dan jasa. Jadi yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang tidak mampu mencari pekerjaan, termasuk dalam golongan yang masih bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain (Sumarsono, 2009).

Menurut UU No.13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 tentang ketenagakerjaan yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan pengertian bekerja adalah

berpartisipasi aktif dalam proses produksi barang dan jasa yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan keluarga, dilindungi undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap penerimaan norma-norma sosial budaya masyarakat setempat. Mereka tersebut dikatakan sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi.

Tenaga kerja atau penduduk usia kerja atau penduduk 10 tahun ke atas, mempunyai perilaku yang beragam. Dalam hubungannya dengan pasar kerja perilaku mereka dipisahkan menjadi dua golongan, yaitu golongan yang aktif secara ekonomis dan bukan. Angkatan kerja termasuk golongan yang aktif secara ekonomis. Golongan ini terdiri dari penduduk yang menawarkan kerjanya dan berhasil memperolehnya (*employed*) dan penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil memperolehnya (*unemployed*). Atas dasar deskripsi ini (*labor force*), dianggap mewakili penawaran tenaga kerja (Afrida, 2003)

2.1.2 Konsep Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Kuncoro (2002) penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja pada suatu perusahaan atau industri akan meningkat apabila jumlah *output* barang yang diproduksi semakin besar dengan

menggunakan *input* yang sedikit sehingga dapat mengurangi biaya produksi yang pada akhirnya akan semakin besar pula permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain apabila output yang dihasilkan banyak, dimana permintaan akan barang tersebut akan meningkat, hal ini akan mendorong pertambahan jumlah *output* yang diproduksi dan pada akhirnya menambah permintaan akan tenaga kerja. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan atau industri meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya yaitu menambah penggunaan tenaga kerja (Sudarsono dalam Lilyawati dan Budhi,2016).

Menurut Handoko (dalam Wijaya, 2014) penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitasnya tenaga kerja, modal pengeluaran non upah.

1. Investasi

Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Ada kalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang telah haus dan perlu didepresiasi (Sukirno,2006)

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atas suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (ceteris paribus), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Mankiw, 2003)

3. Upah

Menurut Sumarsono (2003) upah diartikan sebagai sejumlah dana yang dikeluarkan pengusaha untuk membayar tenaga kerja karena telah melakukan pekerjaannya yaitu menghasilkan produk. Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, pasal 1, Ayat 30: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah akan dilakukan. Menurut Sumarsono perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.

2.1.3 Konsep Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah suatu hubungan antar harga dan kuantitas. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antar tingkat upah (harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipkerjakan dalam jangka waktu tertentu (Afrida,2003).

Menurut Mankiw (2001), dalam memutuskan berapa banyak pekerja yang perlu direkrut ,perusahaan harus mengetahui bagaimana jumlah pekerja mempengaruhi output yang mereka produksi. Ketika jumlah pekerja meningkat, produk marginal tenaga kerjanya justru berkurang. Situasi demikian lazim disebut produk marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal product*). Semakin banyak pekerja yang direkrut, akan semakin sedikit tambahan hasil petikan yang diperoleh sehingga hasil petikan rata-rata pekerja juga menurun.

Dalam mempertimbangkan jumlah pekerja yang hendak direkrutnya, hal terpenting yang diperhitungkan adalah berapa banyak laba yang bisa dihasilkan oleh pekerja. Mengingat laba adalah pendapatan total dikurangi biaya total, maka laba yang dihasilkan oleh seorang pekerja tambahan sama dengan kontribusinya bagi pendapatan perusahaan dikurangi gajinya. Guna mengetahui kontribusinya sipekerja terhadap pendapatan perusahaan, harus mengkonversi atau mengubah produk marginal tenaga kerja menjadi nilai produk marginal (yang diukur dalam

satuan uang). Nilai produk marjinal dari setiap input adalah produk marjinal input tersebut dikalikan dengan harga pasar atas outputnya.

Permintaan tenaga kerja dari sebuah perusahaan itu pada dasarnya memberitahu tentang kuantitas tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan tersebut, berdasarkan upah pasar yang berlaku. Dengan demikian, jelaslah bahwa kurva nilai produk marjinal merupakan kurva permintaan tenaga kerja bagi sebuah perusahaan kompetitif yang memaksimalkan laba.

Menurut Afrida (2003) biasanya permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi.

1. Perubahan Tingkat Upah

- a. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau "*scale-effect*".
- b. Apabila upah naik (asumsi harga barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi

padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya pergantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau “*substitution-effect*”.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja

- a. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.
- b. Harga barang-barang modal, apabila harga barang-barang modal turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual perunit barang akan turun. Pada keadaan ini, produsen cenderung untuk meningkatkan produksi barangnya karena permintaan bertambah besar. Disamping itu, permintaan akan tenaga kerja dapat bertambah besar karena peningkatan kegiatan perusahaan.

Sumarsono (2003) mengatakan sifat permintaan tenaga kerja adalah *derived demand*, yang artinya bahwa permintaan tenaga kerja oleh perusahaan sangat tergantung permintaan masyarakat terhadap hasil produksinya. Sehingga untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan perusahaan, harus tetap stabil dan kalau mungkin meningkat untuk menjaga stabilitas permintaan produk perusahaan serta kemungkinan pelaksanaan ekspor, maka perusahaan harus

memiliki kemampuan bersaing baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan demikian bisa bersaing

2.1.4 Konsep Upah Minimum

Menurut (Sukirno, 2015:351) upah adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya (Sumarsono,2003). Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 78/2015 merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah tanpa tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap. Sukirno (2005) menerangkan pengertian upah dalam teori ekonomi yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh para pengusaha kepada tenaga kerja.

Sebagai sumber pendapatan, tenaga kerja ingin agar upah mencukupi. Oleh karena itu,tenaga kerja pun mempunyai konsep tersendiri tentang seberapa tinggi tingkat upah sebaiknya. Dari berbagai faktor yang dijadikan pertimbangan mereka, ada dua hal yang penting kaitannya dengan pembahasan sekarang ini. Pertama, tingkat upah perlu mencukupi kebutuhan dan yang kedua tingginya upah yang diinginkan agar sesuai dengan harapan ekonomis. Kebutuhan hidup

seseorang biasanya tidak hanya harus mencukupi kebutuhan bagi dirinya sendiri, melainkan juga untuk seluruh anggota rumah tangganya yang intinya terdiri dari atas istri dan anaknya. Jelas sangatlah sulit untuk menentukan luasnya kebutuhan seseorang, apalagi sebuah keluarga agar dapat dikatakan benar-benar memenuhi kebutuhan. kriteria kebutuhan dasar (Basic Needs) pun masih sangat relatif dan dengan sendirinya bervariasi (Afrida,2003).

Menurut Sumarsono (2009), pemerintah telah mengembangkan penerapan upah minimum dengan sasarannya supaya upah minimum itu paling sedikit cukup menutupi kebutuhan hidup karyawan dan keluarganya. Dengan demikian, kebijaksanaan penentuan upah minimum adalah

- a. Menjamin penghasilan karyawan sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu.
- b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan
- c. Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara produksi yang lebih efisien

Menurut Afrida (2003), kebijakan upah minimum dimaksudkan untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar yang berakhir pada tingkat upah yang lebih rendah daripada tingkat upah yang lebih cepat memenuhi kebutuhan. Berbagai kebijakan tersebut di atas bertujuan untuk mengadakan relokasi sumber daya ekonomi masyarakat dan tentu juga untuk menaikkan pendapatan absolut pekerja. Dalam fungsi relokasi, pemerintah dapat memberikan tingkat upah rendah pada sektor-sektor yang tidak dikehendaki berkembang dan dipaksa naik agar lebih merangsang tenaga-tenaga terampil berkualitas tinggi untuk berusaha

disektor-sektor yang ingin dinaikkan produktivitasnya. Diharapkan performansi sektor ini dapat memperbesar aliran sumber daya ke arah sektor ini. Dalam fungsinya untuk menaikkan pendapatan absolut pekerja, sering kali ditempuh cara menetapkan upah minimum.

Simanjuntak (2002) menyatakan bahwa pemerintah setiap tahun atau sekali dalam dua tahun menetapkan upah minimum untuk setiap provinsi atau untuk beberapa daerah kabupaten yang berdekatan tujuan penetapan upah minimum adalah untuk: 1. Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar yang surplus, yang mendorong mereka menerima upah dibawah tingkat kelayakan. 2 Menghindari atau mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi pasar kerja untuk akumulasi keuntungannya. 3.sebagai jaring pengaman untuk tingkat upah karena satu dan lainhal jangan turun lagi. 4 mengurangi tingkat kemiskinan absolute pekerja,terutama bila upah minimum tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dasar dan keluarganya.

Upah minimum kabupaten/kota yaitu upah minimum yang berlaku disebuah wilayah kota/kab sementara upah minimum provinsi yaitu, upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah kota/kab disatu provinsi (Peraturan menteri tenaga kerja dan trans migrasi no 7 tahun 2013).

Penetapan besaran UMK berdasarkan undang-undang rebuplik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ditentukan oleh dewan pengupahan yang anggotanya terdiri dari pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pakar praktisi. Pemerintah dalam hal ini dapetermen tenaga

kerja, dewan pengupahan nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, federasi serikat pekerja seluruh pekerja Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja dan wakil pengusaha melalui asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO). Semua pihak yang berwenang bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan menentukan apa pas tingkat upah tersebut sudah dinaikkan apa belum (Tjiptoherijanto, 2000).

2.1.4 Konsep Investasi

Menurut Deliarnov (2005:121) Investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran membeli bahan baku atau material, mesin-mesin dan peralatan pabrik serta modal lain yang diperlukan dalam proses produksi.

Menurut Rudiger (2004:322) Investasi adalah arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik. Atau dengan kata lain investasi adalah jumlah yang dibelanjakan sektor usaha untuk menambah stok modal dalam periode tertentu.

Menurut Sukirno (2010) Investasi disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang merupakan tingkat pengeluaran agregat. Kegiatan investasi dalam suatu perekonomian dapat mendorong naik turunnya tingkat perekonomian negara yang bersangkutan karena mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal baik untuk mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas usaha yang telah

ada dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan untuk mengeluarkan Investasi.

2.1.5 Isu Keterkaitan Variabel Upah Minimum Regional (UMR) dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

a. Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Haryani (2002), jika tingkat upah meningkat maka permintaan kerja akan menurun yang artinya jumlah tenaga kerja yang diminta akan semakin berkurang namun penawaran tenaga kerja akan semakin bertambah. Sebaliknya, jika tingkat upah menurun maka permintaan terhadap tenaga kerja akan semakin meningkat.

Permintaan tenaga kerja berhubungan dengan fungsi tingkat upah semakin tinggi tingkat upah, maka semakin kecil pengusaha akan tenaga kerja. Setiap perusahaan mempunyai jumlah dan fungsi perusahaan yang berbeda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan atau produksi, jenis usaha, penggunaan teknologi,serta kemampuan manajemen dari perusahaan yang bersangkutan (Simanjuntak,2001)

Kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja akan relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut mendorong pengusaha mendorong pengusaha untuk mengganti relatif tenaga kerja mahal dengan input lain dengan harganya lebih murah guna untuk mempertahankan keuntungan. Kenaikan upah juga mendorong perusahaan meningkatkan harga perunit produk sehingga konsumen cenderung mengurangi konsumsi produk

tersebut. Hal ini banyak menyebabkan hasil produksi yang tidak terjual, akibatnya produsen terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan jumlah produksi tersebut pada akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan (Kuncoro,2002).

b. Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Investasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas yang lebih tinggi yang akan mengakibatkan surplus yang lebih besar, sehingga mempengaruhi proses industri pada sektor yang sama maupun sektor yang lain. Dengan demikian, maka terjadi peningkatan dalam kesempatan kerja sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Sukirno,2006:360)

Adanya investasi akan mendorong terciptanya barang modal sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Rasojo,2009)

Investasi mampu mendorong pertumbuhan tidak hanya berasal dari tabungan domestik. Investasi dari luar negeri juga dapat mempengaruhi GDP dan GNP dengan cara yang berbeda (Mankiw,2003:267). Investasi asing merupakan salah satu cara yang bisa dimanfaatkan oleh sebuah negara untuk tumbuh dan sekaligus mempelajari teknologi terkini yang telah dikembangkan dinegara-negara kaya walaupun sejumlah keuntungan dari investasi ini kembali kepada investor asing, namun investasi ini menyediakan persediaan modal yang kemudian menaikkan produktivitas dan gaji.

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian berdaya saing.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang hampir sama, diantaranya adalah sebagai berikut

No	Nama	Judul	Ringkasan
1	Trianggono Budi Hartono dan Siti Umajah Masjkuri, 2017	Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum regional (UMR) terhadap jumlah pengangguran di Kab dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel jumlah penduduk, pendidikan dan PDRB menunjukkan arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah pengangguran di kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 2. Variabel upah minimum terhadap jumlah pengangguran menunjukkan arah negatif dan tidak berpengaruh terhadap jumlah orang menganggur di kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur.
2	Ni Wayan Mentari dan Nyoman Mahendra Yasa, 2018	Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah terhadap tingkat pengangguran melalui jumlah investasi di Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah investasi pada kab/kota di Provinsi Bali 2. Jumlah investasi merupakan variabel yang memediasi pengaruh variabel

No	Nama	Judul	Ringkasan
			<p>pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan terhadap tingkat pengangguran berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan terhadap tingkat pengangguran melalui mediasi jumlah investasi pada kab/kota di Provinsi Bali</p>
3.	Imam Buchari, 2016	Pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Pulau Sumatera 2012-2015	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah upah minimum dan tingkat pendidikan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di Industri manufaktur di Pulau Sumatera tahun 2012-2015 yang terdiri dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Berdasarkan hasil simultan, upah minimum dan tingkat pendidikan secara signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada Industri manufaktur di Pulau Sumatera. Berdasarkan hasil analisis upah minimum memiliki koefisien negatif tetapi upah minimum tidak memberikan dampak secara parsial dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.</p>
4.	Samuel Randy Tapparan, 2017	Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan 2017	<p>Berdasarkan masalah yang hendak diselesaikan, tujuan yang hendak dicapai dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dari penelitian ini dapat diambil dari beberapa kesimpulan yaitu: upah minimum tidak memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.</p>

No	Nama	Judul	Ringkasan
			Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal yaitu: 1) Pemerintah, perlu menindak tegas perusahaan-perusahaan yang menggaji karyawannya dibawah dari standar upah minimum, 2) Pemerintah perlu mendorong investasi yang bersifat padat karya, serta pemerataan investasi diberbagai daerah.
5.	Kiagus Muhammad Zain Basriwijaya, Hamdi Sari Maryoni, 2015	Pengaruh Investasi, Inflasi, Suku Bunga Dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian Provinsi Riau Sumatera Utara	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor basis di Provinsi Sumatera Utara adalah sektor pertanian, bangunan, perdagangan, pengangkutan, dan sektor jasa. 2. Sektor basis penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara adalah sektor pertanian dan sektor pengangkutan. 3. Variabel upah tenaga kerja dan investasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian Sumatera Utara

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pada masalah pokok yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba untuk mengemukakan hipotesis bahwa Upah Minimum Regional Dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dimana penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau. Penelitian yang dilakukan atas situasi pertimbangan dengan kondisi bertambahnya penduduk dari tahun ketahun,tingkat upah yang selalu meningkat dari tahun ketahun dan tingkat investasi yang menyebabkan terjadinya penyerapan tenaga kerja.

3.2 Sampel dan Populasi

Data yang digunakan adalah data sekunder sehingga sampel dan populasi tidak digunakan karena data dapat diperoleh dari kumpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh instansi pemerintahan Provinsi Riau yang berkaitan dengan penelitian yang akan segera dilakukan, data yang dipakai yaitu dari tahun 2009-2018 di Provinsi Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang telah dilakukan di penelitian ini yaitu data sekunder, yang dimana data diperoleh dari instansi pemerintahan antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Riau yaitu:

1. Angkatan kerja Provinsi Riau
2. Tingkat Upah Minimum Regional di Provinsi Riau

3.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode kepustakaan, yang dimana dilakukan dengan cara mengumpulkan data membaca dari berbagai buku literature yang mempunyai hubungan dengan penelitian.
- b. Teknik dokumentasi merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data yang diambil adalah data angkatan kerja, upah minimum regional dan investasi Provinsi Riau.

3.5 Definisi Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Yang dimana pengertian variabel Dependen yaitu variabel yang memiliki pengaruh oleh variable independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variable dependen adalah penyerapan tenaga kerja. Menurut Kuncoro (2002) penyerapan tenaga kerja terdiri dari lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja tesorap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian.

2. Variabel Independen

Variabel Independen adalah variable yang mempengaruhi variable depenen. Dalam penelitian ini yang menjadi variable independen yaitu:

a. Upah Minimum Regional

Suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industry dalam memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

b. Investasi

Menurut Sukirno (2010) Investasi dapat dikatan dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang merupakan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat mendorong naik turunnya tingkat perekonomian negara yang telah bersangkutan karena mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja.

3.6 Metode Analisis Data

Metode ini digunakan untuk mengukur beberapa variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan sofwareviews dengan bertujuan untuk melihat pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Untuk mengetahui variable faktor upah minimum regional (X_1), dan investasi (X_2) yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau digunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln } X_1 + \beta_2 \text{Ln } X_2 + E_i$$

Keterangan:

Y = Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Riau 10 tahun (Jiwa)

X_1 = Upah Minimum Regional 10 tahun (Juta Rupiah)/Bulan

X_2 = Investasi 10 tahun (Milyar Rupiah)

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Parameter

E_i = Error Term

Dari penelitian yang dilakukan, analisa data yang telah digunakan adalah model regresi berganda data dengan bantuan software eviews 9.0, dan untuk

mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel bebas (Upah Minimum Regional dan Investasi) terhadap variabel terikat (Penyerapan Tenaga Kerja) maka digunakan uji statistik diantaranya.

1. Analisis koefisien determinasi (R^2)

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh dari variabel bebas (Upah Minimum Regional dan Investasi) terhadap variabel terikat (Penyerapan Tenaga Kerja). Semakin besar R^2 , maka semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam metode mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (Upah Minimum Regional dan Investasi) secara signifikan (Penyerapan Tenaga Kerja) variabel yang terikat.

- a. $F_{\text{prob.}} > 0,05$ H_0 diterima, dimana dapat diartikan secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $F_{\text{prob.}} < 0,05$ H_0 ditolak, dimana dapat diartikan secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji T (Parsial)

Pada dasarnya uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas (Upah Minimum Regional dan Investasi) dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (Penyerapan Tenaga Kerja) secara nyata. Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas. Dengan tingkat signifikansi yang digunakan untuk pengaruh variabel bebas (Upah Minimum Regional dan Investasi) terhadap variabel terikat (Penyerapan Tenaga Kerja). Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Jika $Prob < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- b. Jika $Prob > 0,05$ maka H_0 diterima, artinya masing-masing variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dengan menggunakan 4 jenis pengujian yaitu sebagai berikut :

- a. Uji multikolinieritas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi dalam variabel bebas, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas dalam variabel independennya jika saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas ini dapat dihitung dari

nilai VIF (*Value Inflation Factor*), apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas pada penelitian ini dan sebaliknya jika $VIF < 10$ tidak terjadi multikolinieritas pada penelitian ini.

b. Uji Autokorelasi

Uji ini merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variable terikat tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari variable terikat tidak berhubungan dengan variable itu sendiri baik nilai sebelumnya maupun nilai periode sesudahnya. Dasar pengambil keputusannya dengan melihat angka DW (*Durbin-Watson*) apabila :

- a) angka DW dibawah -2 berarti ada korelasi positif.
- b) angka DW diantara -2 – 2 berarti tidak ada auto korelasi.
- c) angka DW diatas 2 berarti ada auto korelasi negative

c. Uji Normalitas

Merupakan pengujian tentang kenormalan tentang distribusi data penggunaan uji ini karena pada analisis statistic parametik, asumsi yang harus di milikioleh data adalah data tersebut harus berdistribusi secara normal. Maksud dari distribusi secara normal adalah bawa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Uji normalitas dapat dilihat dari p-p plot atau melihat dengan histogram residunya dan megikuti ketentuan:

- a) Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola

distribusi normal maka modal regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal dan grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

d. Uji Heteroskedasiitsitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah variable pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak uji ini mempunyai suatu keadaan bahwa varian dari residual dari suatu pengamatan kepengamatan yang lain berbeda, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas yaitu dengan melihat gambar flotantar nilai prediksi variable terikat yaitu ZPRED dengan residual nya SRESID yang tergambar dalam scatter plot dengan mengambil keputusan :

a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedasitas.

b) Jika ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedasitas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis Provinsi Riau

4.1.1. Keadaan Alam

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, Provinsi Riau juga dikenal sebagai penghasil minyak dan sawit terbanyak dibandingkan provinsi yang lainnya, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Provinsi Riau. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan selat Malaka, terletak antara $01^{\circ}05'00''$ Lintang Selatan sampai $02^{\circ}25'00''$ Lintang Utara atau antara Lintang Utara $100^{\circ}00'00''$ Bujur Timur- $105^{\circ}05'00''$. Dimana 80,11% di antaranya merupakan wilayah daratan sedangkan sisinya adalah daerah lautan yang berbatasan dengan negara lain yang berkisaran luas daerah Zona Ekonomi Eksklusif adalah 379.000 km². Dengan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No.37 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2019 Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 87.023,66 km². Berdasarkan kondisi geomorfologi Provinsi Riau terdapat tiga daerah daratan yaitu bagian timur,tengah dan barat, yang dimana bagian timur terdapat daratan rendah yang memiliki ketinggian antara 0-10 meter. Serta bagian tengah merupakan daratan bergelombang, barat yang didominasi daratan berbukit dibentuk oleh gugusan barisan. Akibat kondisi geomorfologi yang terjadi di Provinsi Riau yang telah menempatkan wilayah riau bagian Timur sebagai

kawasan bawahan dari wilayah barat yang mengalir dari 15 sungai yang bermuara di pantai timur.

Batas-batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau adalah:

1. Kabupaten Kuantan Singingi
2. Kabupaten Indragiri Hulu
3. Kabupaten Indragiri Hilir
4. Kabupaten Pelalawan
5. Kabupaten Siak
6. Kabupaten Kampar
7. Kabupaten Rokan Hulu
8. Kabupaten Bengkalis
9. Kabupaten Rokan Hilir
10. Kabupaten Kepulauan Riau
11. Kota Pekanbaru
12. Kota Dumai

Seperti kita ketahui bahwasannya Provinsi Riau mempunyai beberapa sungai-sungai besar yang berfungsi sebagai prasana perhubungan yang terdiri dari sungai indragiri (500 km) yang mempunyai kedalaman 6-8 meter, sungai indragiri ini adalah sungai yang paling terpanjang diantara sungai yang lainnya, namun bukan sungai yang terdalam dari antara sungai yang lainnya, kedua adalah sungai kampar (400 km) dengan kedalaman 6meter, ketiga sungai rokan yang panjangnya berkisaran (400 km) memiliki persamaan panjang dengan sungai kampar, namun memiliki kedalaman yang lebih dari sungai kampar karena

kedalamannya kurang lebih 6-8 meter, dan yang terakhir sungai siak yang memiliki panjang yang lebih kecil dari sungai yang lainnya namun memiliki kedalaman yang lebih dalam dari ketiga sungai di atas yang dimana memiliki kedalaman 8-12 meter. Adapun dapat dijelaskan dari tabel yang dibawah ini mengenai luas kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Riau

Tabel 4.1: Nama Ibukota dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota Provinsi Riau	Wilayah Ibu Kota Kabupaten	Luas Wilayah (Km ²)	Luas Persentase
1	Kampar	Bangkinang	10983,47	12,62
2	Indragiri Hulu	Rengat	7723,80	8,88
3	Bengkalis	Bengkalis	6975,41	8,02
4	Indragiri Hilir	Tembilahan	12614,78	14,50
5	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	12758,45	14,66
6	Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	7588,13	8,72
7	Rokan Hilir	Bagansiapiapi		10,21
8	Siak	Siak Sri Indrapura	8275,18	9,51
9	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	5259,36	6,04
10	Kepulauan Meranti	Selatpanjang	3707,84	4,26
11	Pekanbaru	Pekanbaru	632,27	0,73
12	Dumai	Dumai	1623,38	1,87

Sumber: Badan Pusat Statistik

4.1.2 Iklim dan Curah Hujan Provinsi Riau

Provinsi Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan kisaran 1700-400 milimeter pertahunnya, yang berpengaruh oleh musim kemarau dan musim penghujan. Di Provinsi Riau, ada 5 wilayah yang melakukan pengamatan iklim, yaitu Stasiun Meterologi Bandara Japura Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu, Pos Pengamatan Meterologi Bandara RAPP Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan, Stasiun Klimatologi Tambang di Kabupaten Kampar,

Stasiun Meterologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan Pos Pengamatan Meterologi Bandara Pinang Kampai di Kota Dumai.

Dari lima wilayah tersebut, selama tahun 2018, suhu tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru dengan maksimal suhu sebesar 36,40 derajat celcius, serta suhu terendah terjadi di Japura Rengat dengan suhu sebesar 21,20 derajat celcius. Dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, curah hujan tertinggi terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 3.356,00 mm, kemudian disusul Kabupaten Kampar sebesar 2.702,00 mm, serta kota Pekanbaru sebesar 2.504,00 mm. Curah hujan yang rendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1.847,00 mm.

Sedangkan jumlah hari hujan, dari 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, hari hujan terbanyak terjadi di Kabupaten Rokan Hulu yaitu 221 hari, sedangkan kabupaten yang paling sedikit terjadi hujan di kabupaten kepulauan Meranti.

Menurut catatan stasiun Meterologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata dikota Pekanbaru pada tahun 2018 27,50 celcius dengan suhu maksimum 36,40 celcius dan suhu minimum 20,70 celcius

4.2 Pemerintahan Provinsi Riau

Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti) dan dua kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Provinsi Riau memiliki 168 Kecamatan dan 1875 Desa/Kelurahan pada tahun 2018 yang dikepalai oleh seorang lurah/kepala desa. Sebagai Provinsi Riau dikepalai oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah dengan satu orang Wakil Gubernur. Di dalam melaksanakan tugasnya, ada 3 organisasi perangkat staf

pemerintahan daerah yaitu: Sekretaris Daerah(Sekda),Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Inspektorat Daerah. Sekretaris Daerah membawahi tiga asisten yaitu: 1. Asisten I Bidang pemerintahan, 2. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra,3. Asisten III Bidang Administrasi Umum.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di samping bertugas secara teknis, juga mengkoordinir dan menginterasikan usaha, penyusunan rencana dan program kerja. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas dengan tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelelawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti, serta 2 kota yaitu Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Walikota.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada tahun 2018 sebanyak 65 orang. Dari jumlah tersebut 47 orang adalah laki-laki dan 18 orang perempuan. Selanjutnya, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2018 sebanyak 480 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 432 orang laki-laki dan 48 orang perempuan.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2018 sebanyak 15.752 orang. Dari jumlah tersebut 7.282 adalah

pegawai laki-laki dan 8.470 pegawai perempuan. Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah PNS golongan III paling banyak, yaitu sebesar 10.301 orang, menyusul golongan IV sebesar 3.587 orang dan golongan II sebanyak 1.899 orang, sedangkan sisanya 62 orang adalah pegawai golongan I.

Lebih dari 89 persen PNS di pemerintah Provinsi Riau memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan setingkat SLTA hingga S1-S3. PNS yang berpendidikan SLTA-Diploma I-IV berjumlah 2.660 orang, serta sebanyak 11.454 orang Sarjana (S1), Pasca Sarjana. Sementara PNS yang berpendidikan dibawah SLTA berjumlah 160 orang.

Tabel 4.2. Jumlah Kecamatan, Kelurahan /Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2018.

No	Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2018	Kecamatan di Provinsi Riau Tahun 2018	Kelurahan/Desa Provinsi Riau 2018
1	Kampar	21	250
2	Rokan Hulu	16	145
3	Bengkalis	11	155
4	Rokan Hilir	18	198
5	Dumai	7	33
6	Kepulauan Meranti	9	103
7	Pekanbaru	12	83
8	Kuantan Singingi	15	229
9	Indragiri Hilir	20	236
10	Indragiri Hulu	14	194
11	Pelalawan	12	118
12	Siak	14	131
	Provinsi Riau	169	1875

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa kecamatan, kelurahan/ Desa di Provinsi Riau sebanyak 169 kecamatan dan jumlah kelurahan /desa sebanyak 1875. Serta Kabupaten/Kota dengan jumlah kecamatan yang paling banyak adalah kabupaten Kampar yaitu sebanyak 21 kecamatan, sedangkan yang paling sedikit yaitu kabupaten Dumai memiliki 7 kecamatan begitupun dengan kelurahan/desa yang paling banyak yaitu Kampar, dan yang paling sedikit kelurahan/desa yaitu Kota Dumai

4.3 Penduduk Provinsi Riau

Penduduk adalah mereka yang telah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap (BPS,2012) Penelitian yang berkaitan dengan penduduk dan unsur yang mempengaruhi tingkat perubahannya dinamakan demografi. Analisis ekonomi sudah menguraikan masalah demografi, yaitu usaha dengan cara memusatkan perhatian pada insentif dan motivasi perubahan tingkah laku individu. Para ahli ekonomi lebih percaya bahwa demografi dengan penekanan pada akar ekonomi dari tingkah laku manusia sudah memberikan jawaban yang memuaskan dibandingkan dengan kerangka teoritis lainnya.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor dalam melakukan produksi, karena penduduk merupakan sumber dari pada faktor tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa, disamping itu penduduk juga merupakan suatu pangsa pasar yang sangat potensial, dengan jumlah penduduk yang banyak atau jumlah yang sangat besar maka terdapat pasar yang cukup luas. Berdasarkan data pada Biro Pusat Statistik Provinsi Riau, jumlah penduduk Provinsi Riau

menurut hasil proyeksi yaitu sebesar 6.814.91 jiwa pada tahun 2018 yang terdiri atas 3.495.705 penduduk laki-laki dan 3.319.204 penduduk perempuan. Jumlah penduduk meningkat sebesar 2,36% bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 6.657.911 jiwa. Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Riau pada tahun 2018 sebesar 105,32. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018.

No.	Kecamatan/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Kuantan Singingi	5259,36	324,41
2	Indragiri Hulu	7723,80	433,93
3	Indragiri Hilir	12614,78	731,40
4	Pelalawan	12758,45	460,78
5	Siak	8275,18	477,67
6	Kampar	10983,47	851,84
7	Rokan Hulu	7588,13	666,41
8	Bengkalis	6975,41	566,23
9	Rokan Hilir	8881,59	697,22
10	Kepulauan Meranti	3707,84	184,37
11	Pekanbaru	632,27	1.117,36
12	Dumai	1623,38	303,29
	Provinsi Riau	87023,66	6814,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau Dalam Angka 2018

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Kabupaten/Kota wilayah terluas ialah Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas 12.614,78 km² dan yang paling kecil wilayahnya adalah Kota Pekanbaru 632,27 km². Selanjutnya Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kota Pekanbaru yaitu 1.117,36 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada pada Kepulauan Meranti sebesar 184,37 jiwa.

Kependudukan merupakan suatu masalah yang berdampak terhadap perekonomian. Di negara maju besarnya jumlah penduduk dianggap sebagai pencegah atau penghambat terjadinya stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di negara berkembang, jumlah penduduk yang terus meningkat dapat meningkatkan stagnasi dalam perkembangan ekonomi. Begitu pula dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dapat mengakibatkan ketimpangan perekonomian, sehingga diperlukan peran pemerintah agar meratanya penyebaran penduduk disuatu daerah dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, yang disebut transmigrasi. Penduduk juga memiliki peran penting karena dapat dipakai sebagai sumber tenaga kerja, namun demikian pemerintah mengeluarkan peraturan agar perlunya dilakukan program KB (Keluarga Berencana) agar tidak pesatnya terjadi pertumbuhan penduduk. Hal ini juga merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar tidak terjadinya peningkatan pengangguran. Selanjutnya dapat dijelaskan mengenai penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Riau tahun 2018, yang dapat di lihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 4.4 Tabel Penduduk Provinsi Riau Tahun 2018 Menurut Kelompok Umur (Jiwa)

No.	Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)
1	0-4	739.071
2	5-9	695.668
3	10-14	634.084
4	15-19	595.837
5	20-24	587.169
6	25-29	612.796
7	30-34	574.826
8	35-39	541.375
9	40-44	495.912
10	45-49	408.693
11	50-54	317.702
12	55-59	235.998
13	60-64	162.461
14	65-69	98.908
15	70-74	58.361
16	75+	56.012
	Jumlah	6.814.909

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa penduduk pada usia 0-4 tahun yang paling banyak yang berjumlah 739.071 jiwa. Sedangkan penduduk dengan jumlah yang terendah berada di umur 75+ dengan sebanyak 56.012 jiwa. Dengan jumlah seluruh penduduk di Provinsi Riau yaitu 6.814.909 jiwa.

Tabel 4.5 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Riau Pada Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja (Jiwa)
1	Kuantan Singingi	15.2017
2	Indragiri Hulu	206.355
3	Indragiri Hilir	344.371
4	Pelalawan	230.421
5	Siak	215.390
6	Kampar	367.149
7	Rokan Hulu	319.666
8.	Bengkalis	256.741
9	Rokan Hilir	294.943
10	Kepulauan Meranti	90.781
11	Pekanbaru	558.065
12	Dumai	150.323

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mampu menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), dimana secara potensial Provinsi Riau mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup banyak untuk dikembangkan kemudian di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan ialah merupakan suatu masalah yang terkait dengan kependudukan yang dimana tingginya tingkat pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh dengan tingginya penyediaan (supply) tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja yang tinggi yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang cukup akan menyebabkan pengangguran. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Variabel Penelitian

Yang dimana dapat dijelaskan mengenai perkembangan variabel dalam penelitian antara lain upah minimum regional, investasi, terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

5.1.1 Perkembangan Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Riau

Upah Minimum ditetapkan oleh pemerintah yang berdasarkan kebutuhan hidup layak dan juga dengan memperhatikan produktivitas para pekerja dan pertumbuhan ekonomi Provinsi.

Tabel 5.1 Upah Minimum Regional di Provinsi Riau dari tahun 2009-2018 (rupiah)

NO	Tahun	Upah Minimum Regional (UMR)
1	2009	901.600
2	2010	1.016.000
3	2011	1.120.000
4	2012	1.238.000
5	2013	1.400.000
6	2014	1.700.000
7	2015	1.878.000
8	2016	2.095.000
9	2017	2.266.722
10	2018	2.463.928

Sumber: Badan Pusat statistik, Provinsi Riau 2019.

Berdasarkan dari tabel 5.1 di atas dapat kita lihat dari perkembangan upah dari tahun 2009-2018 di Provinsi Riau. Setiap tahun Provinsi Riau menaikkan

upah Minimum Regional untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian wilayah di Provinsi Riau pada tahun 2009 tingkat *UMR* berjumlah Rp. 901.600 dan pada tahun 2018 berjumlah Rp. 2.463.928.

5.1.2 Perkembangan Investasi

Investasi pada umumnya dibedakan berdasarkan sumber modalnya yaitu bersumber dari dalam negeri (PMDN) dan yang bersumber dari luar negeri atau asing (PMA). Investasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam perkembangannya investasi selalu mengalami pasang surut yang dikarenakan oleh beberapa kondisi yang tidak mendukung untuk hal investasi. Situasi politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi kondisi penanaman modal, demikian juga halnya dengan sistem yang ada di daerah, baik sistem perizinan maupun kondisi yang mendukung untuk investasi seperti tenaga terampil dan terdidik.

Berikut ini adalah perkembangan nilai investasi di Provinsi Riau.

Tabel 5.2 Investasi di Provinsi Riau pada tahun 2009-2018 (Milyar Rupiah)

No.	Tahun	PMDN	PMA	Investasi
1	2009	3.386,00	2.968,88	6.354,88
2	2010	1.037,13	805,69	1.842,82
3	2011	7.462,60	1.974,75	9.437,35
4	2012	5.450,43	10.721,55	16.171,98
5	2013	4.874,27	12.309,73	17.184,00
6	2014	7.707,55	14.674,75	22.382,30
7	2015	9.943,04	8.167,42	18.110,42
8	2016	6.613,70	11.901,79	18.515,42
9	2017	10.829,8	14.189,00	25.018,53
10	2018	9.056,4	13.840,59	22.896,99

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019.

Tahun 2009 nilai investasi baik PMDN maupun PMA mengalami fluktuasi yang cukup tinggi dari tahun ke tahun seiring dengan situasi ekonomi di tanah air dan dunia. Di tahun 2009 realisasi penerimaan PMDN dan PMA mencapai 6.354,88 dan tahun 2018 realisasi penerimaan PMDN dan PMA 22.896,99.

5.2 Analisis Statistik Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Dapat kita lihat dari pengolahan data dengan menggunakan program eviews 9.0 yang dilakukan oleh Penyerapan Tenaga Kerja (Y) sebagai variabel yang terikat sedangkan Upah Minimum Regional (x_1), serta Investasi (x_2) sebagai variabel bebas dengan kurun waktu sepuluh tahun 2009-2018 berikut ini hasil dari regresinya.

Tabel 5.3 : Hasil estimasi pengaruh upah minimum regional dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 03/08/20 Time: 12:38
 Sample: 2009 2018
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1864716.	50607.43	36.84669	0.0000
X1	0.507205	0.056014	9.055002	0.0000
X2	-0.264863	4.083632	-0.064860	0.9501

R-squared	0.977387	Mean dependent var	2676081.
Adjusted R-squared	0.970927	S.D. dependent var	282001.5
S.E. of regression	48083.93	Akaike info criterion	24.64261
Sum squared resid	1.62E+10	Schwarz criterion	24.73338
Log likelihood	-120.2130	Hannan-Quinn criter.	24.54303
F-statistic	151.2802	Durbin-Watson stat	2.267968
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9.0

Hasil olahan data di atas dapat kita lihat estimasi fungsi persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1.864.716 + 0,507205 X_1 - 0.264863 X_2 + E$$

Dari hasil pengujian di atas dapat kita lihat hubungan kedua variabel bebas dan terikat tersebut. Terdapat pengaruh positif dan negatif di dalam kedua variabel tersebut terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Variabel Terikat) tahun 2009-2018. Berikut ini akan dijelaskan tentang pengaruh tersebut secara rinci.

a. Koefisien Regresi

Berikut ini hasil upah minimum regional dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja analisis regresi yaitu:

1. Dimana Konstanta b_0 bernilai 1.864.716 yang dapat diartikan bawah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau pada tahun 2009-2018 jika upah minimum regional dan investasi sama dengan 0 adalah 1.864.716 rupiah
2. Nilai koefisien b_1 sebesar 0.507205 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti Variabel upah minimum regional (x_1) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) di Provinsi Riau pada tahun 2009-2018. Maksudnya adalah jika terjadi peningkatan 1% terhadap upah minimum regional, maka jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau akan meningkat 0,51%
3. Nilai koefisien b_2 sebesar -0.264863 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti bahwa variabel investasi (x_2) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) di Provinsi Riau pada tahun 2009-2018. Maksudnya adalah jika investasi naik 1% maka jumlah penyerapan tenaga kerja akan turun sebesar 0,27%

5.2.1 Analisis koefisien determinasi (R^2)

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh dari variable bebas (Upah Minimum Regional dan Investasi) terhadap variable terikat (Penyerapan Tenaga Kerja). Yang Sesuai dengan pengolahan data yang dilakukan, Diketahui R^2 berjumlah 0.977387. Yang dimana dapat kita ketahui Upah Minimum Regional dan Investasi sudah mewakili 97% untuk penyerapan tenaga kerja. Dan sisanya berjumlah 3% dijelaskan pada variabel diluar model.

5.2.2 Uji F

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau pada tahun 2009-2018, uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara signifikan terhadap variabel terikat. Dimana jika nilai sig > signifikansi 0,05 H_0 diterima atau variabel bebas secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (tidak signifikan). Dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan pada perubahan variabel bebas. Berdasarkan hasil dari penelitian dimana F-Prob sebesar $0,000002 < \alpha 0,05$ H_0 ditolak begitupun dengan sebaliknya H_a diterima yang dimana dapat dilihat dari variabel terikat Upah Minimum Regional dan Investasi mempunyai pengaruh yang secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau (Variabel Terikat)

5.2.3 Uji T (Parsial)

Uji T (Parsial) pengujian koefisien terhadap variabel bebas yang dilakukan secara parsial. Dilakukannya Uji T agar kita dapat mengetahui variabel bebas secara individu (parsial) memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel tidak bebas. Dilakukan perbandingan satu signifikan dengan $\alpha 0,05$. Yang dapat kita lihat sebagai berikut:

Jika $T \text{ prob} > \alpha 0,05$ maka H_0 diterima

Jika $T \text{ prob} < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak

Berikut ini penjelasan mengenai uji T:

- a. Pengujian pengaruh Upah Minimum Regional (x_1) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) berdasarkan hasil uji T (Parsial) maka diketahui nilai T prob secara parsial sebesar $0,000002 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal tersebut berarti secara parsial upah minimum regional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau 2009-2018.
- b. Pengujian Investasi (x_2) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) berdasarkan hasil uji T (Parsial), maka diketahui bahwa nilai T prob Investasi sebesar $0,09501 > \alpha 0,05$ maka H_0 diterima. Hal tersebut berarti secara parsial Investasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau pada tahun 2008-2018.

5.2.4 Uji Asumsi Klasik

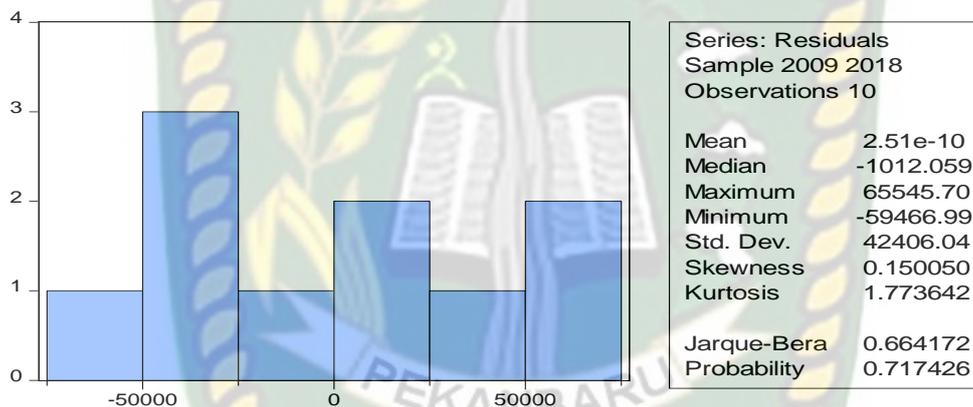
Uji asumsi klasik dengan menggunakan 4 jenis pengujian yaitu sebagai berikut :

- a. Uji Normalitas

Merupakan pengujian tentang kenormalan tentang distribusi data penggunaan uji ini karena pada analisis statistic parametik, asumsi yang harus di miliki oleh data adalah data tersebut harus berdistribusi secara normal. Maksud dari distribusi secara normal adalah bawa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Uji normalitas dapat dilihat dari p-p plot atau melihat dengan histogram residunya dan megikuti ketentuan:

1. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka modal regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal dan grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 5.1 : Hasil Uji Normalitas Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja



Sumber: Hasil Olah Eviews 9

Dari hasil estimasi bahwa histogram residual model regresi tersebut tidak berbentuk lonceng, kedua variabel tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal, yang dapat kita lihat dari Jarque-Bera $0.664172 < 14,07$

b. Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi dalam variabel bebas, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas dalam variabel independennya jika saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas ini dapat dihitung dari nilai VIF (*Value Inflation Factor*), apabila nilai $VIF > 10$ maka

terjadi multikolinieritas pada penelitian ini dan sebaliknya jika $VIF < 10$ tidak terjadi multikolinieritas pada penelitian ini.

Tabel 5.4 :Hasil Uji Multikolinieritas Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau pada Tahun 2009-2018

Variance Inflation Factors

Date: 03/10/20 Time: 10:16

Sample: 2009 2018

Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.56E+09	11.07716	NA
X1	0.003138	38.82066	3.735679
X2	16.67605	21.72183	3.735679

Sumber: Hasil Olah Eviews 9.0

Berdasarkan pengolahan data, dapat diketahui nilai VIF dari variabel independen yaitu nilai VIF x_1 adalah 3.735679, nilai x_2 adalah 3.735679. Dapat dilihat bahwa nilai VIF dari ketiga variabel tersebut lebih besar dari 10 maka variabel tersebut terkena multikolinieritas. Hal tersebut berarti bahwa Upah Minimum Regional, Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja memiliki hubungan linier didalam model regresi tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas.

Uji ini digunakan untuk melihat apakah variable pengganggu mempunyai vaarian yang sama atau tidak uji ini mempunyai suatu keadaan bahwa varian dari residual dari suatu pengamatan kepengamatan yang lain berbeda, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas yaitu dengan melihat gambar

flotantaranilai prediksi variable terikat yaitu ZPRED dengan residual nya SRESID yang tergambar dalam scatter plot dengan pengambilan keputusan :

- a) Jika ada pola tertentu seper titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastias.
- b) Jika ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Tabel 5.5 : Hasil Uji Heterokedasitas Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau pada Tahun 2009-2018.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.418811	Prob. F(5,4)	0.8172
Obs*R-squared	3.436228	Prob. Chi-Square(5)	0.6331
Scaled explained SS	0.651311	Prob. Chi-Square(5)	0.9855

Sumber: Hasil Olah Eviews 9.0

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai chi-square adalah sebesar 3.436228 kritis chi-square sebesar 14.017 dapat dilihat bahwa nilai chi square lebih besar dari nilai kritis yang artinya model regresi tersebut terjadi heterokedastisitas.

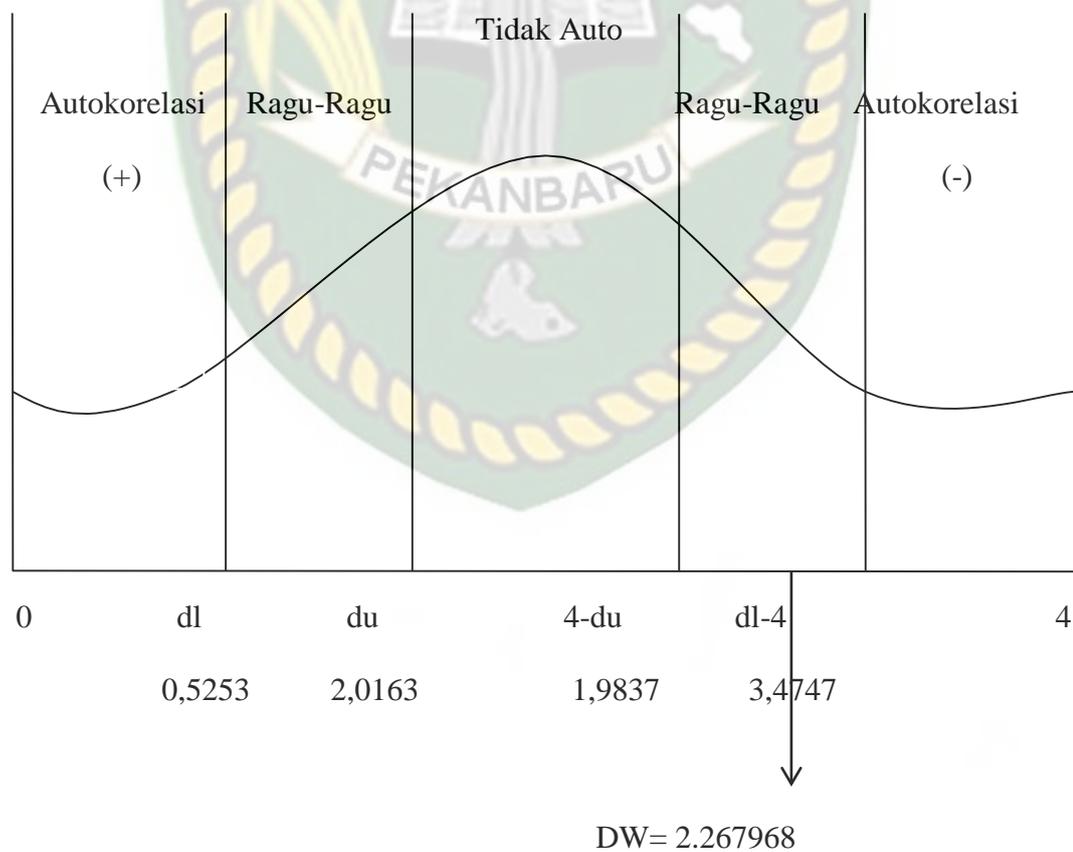
d. Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi atau tidak ada korelasi antara variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Model regresi yang baik ialah regresi yang bebas dari

autokorelasi. Uji ini merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variable terikat tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari variable terikat tidak berhubungan dengan variable itu sendiri baik nilai sebelumnya maupun nilai periode sesudahnya. Dasar pengambil keputusannya dengan melihat angka DW (*Durbin-Watson*) apabila :

- angka DW dibawah -2 berarti ada korelasi positif.
- angka DW diantara -2 – 2 berarti tidak ada auto korelasi.
- angka DW diatas 2 berarti ada auto korelasi negative

Gambar 5.1: Hasil Uji Autokorelasi Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja



5.3 Analisis Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Riau.

1. Pengaruh Upah Minimum Regional (X1) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Riau.

Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui variabel upah minimum regional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau pada tahun 2009-2018. Dapat dilihat dari uji T (Parsial) bahwa nilai (α_1) sebesar 0,507205 dan nilai T probabilitas $0,0000 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak. Sehingga variabel Upah Minimum Regional memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau tahun 2009-2018 artinya naik turunnya upah minimum regional memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau tahun 2009-2018.

2. Pengaruh investasi (X2) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) Di Provinsi Riau tahun 2009-2018.

Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui variabel Investasi mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau pada tahun 2009-2018. Dapat dilihat dari uji T(Parsial) bahwa nilai (α_1) sebesar 0,9501 dan nilai T probabilitas $-0.264863 < 0,05$. Dengan demikian maka H_0 diterima. Artinya adalah bahwa investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

5.1 Pembahasan

Dari penelitian di atas, maka diketahui bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau tahun 2009-2018. Hasil penelitian yang telah dilakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Buchari (2016) yang mengemukakan bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kemudian diketahui variabel Investasi memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau, hasil penelitian ini menunjukkan berbedanya dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang dimana hasil penelitian yang telah dilakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiagus Muhammad Zain Basriwijaya, Hamdi Sari Maryoni, 2015 yang mengemukakan bahwa Pengaruh Investasi, Inflasi dan suku bunga dan tingkat Upah terhadap Penyerapan tenaga Kerja di sektor pertanian Provinsi Riau Sumatera Utara Variabel upah tenaga kerja dan Investasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di Sumatera Utara.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh tingkat upah minimum regional dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau pada tahun 2009-2018 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upah Minimum Regional berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau atau dengan berdasarkan uji T(Parsial) dapat kita ketahui bahwa nilai T Probabilitas upah minimum regional sebesar ($0,0000 < \alpha 0,05$) maka H_0 ditolak yang artinya upah minimum regional berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau pada tahun 2009-2018.
2. Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau dengan berdasarkan uji T(Parsial) dapat kita ketahui bahwa nilai T Probabilitas upah minimum regional sebesar ($0,9501 > \alpha 0,05$) maka H_0 diterima pada tahun 2009-2018. Dengan demikian Investasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau pada tahun 2008-2018.
3. Berdasarkan olahan dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar yaitu sebesar 0.977387 Hal ini berarti bahwa sebesar 97% Upah Minimum Regional dan Investasi sudah memiliki hubungan signifikan terhadap Penyerapan

Tenaga Kerja. Sedangkan sisanya sebesar 3% dapat dilihat dari variabel diluar model.

6.2 Saran

Hasil dari penelitian diatas , penulis memberikan saran yang dimana dapat dipertimbangkan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak berikut.

1. Untuk pemerintah serta instansi terkait, diharapkan meningkatkan upah minimum regional yang lebih baik lagi.
2. Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk menambah variabel, menggunakan model lain, memperluas daerah penelitian jika ingin mengadakan penelitian upah minimum regional .
3. Diharapkan upah minimum regional sesuai dengan pengeluaran dan kebutuhan masyarakat agar terpenuhi.

DAFTAR PUSTKA

- Afrida. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Gahalia Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Angkatan Kerja*. Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Deliarnov. 2005 *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Haryani, Sri. 2002. *Hubungan Industrial di Indonesia UPP AMP YKPN*. Yogyakarta
- Kuncoro, Haryo 2002 *Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 7 No.1. Halaman 45-46
- Lilyawati dan Made Kembar Sri Budhi. 2016. *Ekonomi Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.5, No.8 Agustus 2016
- Mulyadi, Subri. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Payman.J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia . Edisi 2001*. Jakarta, FE UI.
- Simanjuntak, Payman.J. 2002 *“Masalah Upah dan Jaminan Sosial”*, dalam Undang-Undang yang baru tentang serikat Pekerja/Buruh. Kantor Perburuhan Internasional: Jakarta
- Sumarsono. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Sumarsono, Sonny. 2003 *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan Edisi Pertama*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Sukirno, Sadono. 2015 *Mikro Ekonomi. Edisi Ketiga*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang yang baru tentang serikat pekerja/serikat buruh. Kantor Perburuhan Internasional: Jakarta

Undang-Undang yang baru tentang Serikat Pekerja/Sertifikat Buruh. Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional.

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Upah Minimum Regional.

Undang-Undang yang baru tentang Serikat Pekerja/Sertifikat Buruh. Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional.

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Upah Minimum Regional.

Trianggono Budi Hartanto & Siti Umajah Masjkuri. 2017 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Regional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014, Vol

Tjiptoherijant, p 2000. *Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta